

BAB I

PENDAHULUAN

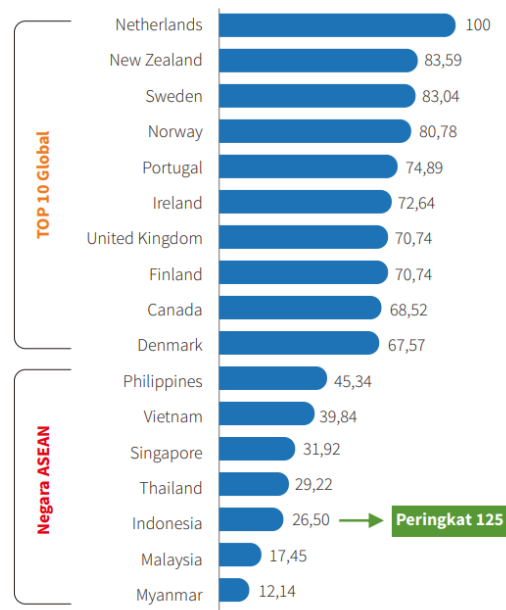
1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin segala hak warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Sebagai negara yang menjunjung hak asasi manusia juga wajib menjunjung tinggi hukum tanpa mengecualikan beberapa orang. Kesetaraan hak menjadi peran penting dalam mendukung peran hak asasi pada setiap manusia. Adanya kesetaraan di dalam menjamin hak manusia demi terciptanya sebuah kesejahteraan bagi masyarakat.

Dengan beragamnya agama, suku, kebudayaan, maupun kekayaan di Negara Indonesia sebagai warganya kita harus saling menghormati antar perbedaan tersebut. Tidak hanya perbedaan dalam hal itu saja, Tuhan pun menciptakan perbedaan pada setiap manusia. Perbedaan tersebut termasuk pada hal fisik, seperti bentuk hidung, bentuk telinga, bentuk rambut serta terdapat kondisi tubuh yang berbeda. Namun, perbedaan kondisi tubuh tidak hanya disebabkan oleh faktor dari lahir, akan tetapi juga bisa terjadi akibat pengalaman kecelakaan yang pernah menimpa individu sehingga dia menjadi seseorang yang tergolong penyandang disabilitas. Berdasarkan UU No. 8 Tahun 2016, penyandang disabilitas adalah seseorang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama. Keterbatasan ini dapat menghambat seseorang untuk berinteraksi dan lingkungan dapat kesulitan juga untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Keterbatasan yang dimiliki penyandang disabilitas, terkadang menjadi alasan terjadinya diskriminasi, karena mereka berbeda dibandingkan individu normal. Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan oleh BPS di tahun 2020, yang dimaksud anggota penyandang disabilitas dikelompokkan menjadi 8 jenis yakni kesulitan atau masalah dalam (i) melihat, (ii) berjalan, (iii) konsentrasi / ingatan, (iv) mendengar, (v) berkomunikasi, (vi) menggunakan tangan / jari, (vii) mengurus diri sendiri, (viii) gangguan perilaku / emosi.

Salah satu indikator yang menjadi acuan perkembangan disabilitas global atau di dunia adalah indeks inklusivitas. Indeks inklusivitas adalah ukuran holistik dari pembangunan inklusif yang berfokus pada kesetaraan ras/etnis, agama, gender, dan disabilitas di ranah perwakilan politik, kekerasan di luar kelompok, ketimpangan pendapatan, tingkat penahanan, dan kebijakan imigrasi dan pengungsi. (Buku *inclusiveness index: Measuring Global Inclusion and Marginality* (2020)). Berikut adalah gambar urutan Indeks Inklusivitas Global pada Tahun 2020.



Gambar 1. 1 Indeks Inklusivitas Global 2020

Sumber: 2020 inclusiveness index: Measuring Global Inclusion dan Marginality

Berdasarkan data *Measuring Global Inclusion dan Marginality* pada gambar 1.1 memperlihatkan bahwa di tahun 2020 Indonesia secara global menempati peringkat 125 (dengan nilai=26,5) dalam pelaksanaan pembangunan inklusif. Angka tersebut tentu masih jauh tertinggal dari negara-negara maju seperti, Belanda, Selandia Baru, Swedia, UK, dan sebagainya. Di antara negara-negara ASEAN, peringkat Indonesia pun masih di bawah Filipina, Vietnam, Singapura, dan Thailand namun masih di atas Malaysia dan Myanmar.

Berdasarkan informasi pada portal berita yang dipublikasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendiknas) bahwa jumlah penyandang disabilitas di Indonesia di tahun 2023 mencapai 22,97 juta jiwa atau sekitar 8,5% dari jumlah penduduk

Indonesia. Berdasarkan peringkat indeks inklusivitas pada Gambar 1.1 Indonesia mendapat peringkat rendah juga disebabkan oleh masih adanya anggota masyarakat yang mengalami keterbatasan dalam melaksanakan fungsi sosialnya pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Tabel 1. 1 Data Jumlah Penyandang Disabilitas PerKabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2021

Kab/Kota	Jumlah Penyandang
Kebumen	2731
Purworejo	2500
Pati	2409
Klaten	2194
Magelang	2033
Banyumas	2012
Brebes	1796
Tegal	1769
Wonogiri	1710
Banjarnegara	1680
Pekalongan	1648
Boyolali	1613
Cilacap	1583
Blora	1574
Kendal	1525
Wonosobo	1513
Temanggung	1509
Grobogan	1498
Rembang	1497
Purbalingga	1481
Pemalang	1377
Demak	1316
Batang	1301
Semarang	1246
Sragen	1226
Jepara	1198
Sukoharjo	964
Karanganyar	946
Kota Semarang	863
Kudus	697
Kota Surakarta	329

Kota Tegal	185
Kota Pekalongan	175
Kota Salatiga	141
Kota Magelang	78

Sumber: BPS Jawa Tengah

Berdasarkan Survei Badan Pusat Statistik (BPS) ditahun 2021 jumlah penduduk penyandang disabilitas Kabupaten Wonogiri menduduki urutan ke delapan (8) dari 34 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Wonogiri termasuk Kabupaten yang memiliki banyak Penduduk Penyandang Disabilitas. Seharusnya, individu tersebut perlu didukung dan dilindungi oleh negara salah satunya menggunakan perangkat administrasi publik. Berdasarkan website detik jateng, pada tahun 2023 Kabupaten Wonogiri terdapat sekitar 10.000 penyandang disabilitas. Untuk jumlah penyandang yang sudah berdaya atau memiliki usaha sendiri di tahun 2023 sejumlah 225 penyandang. Tiap usaha diberikan bantuan oleh Dinas Sosial sebesar Rp. 2.000.000 hal ini dikutip dari website detik jateng, yang disampaikan oleh Trias Budiono sebagai Kepala Bidang (Kabid) Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial Dinsos Wonogiri.

Dengan banyaknya jumlah penyandang disabilitas yang ada seharusnya mereka berhak mendapatkan kesetaraan hak bagi penyandang-penyandang yang berada di Indonesia, khususnya di Wonogiri. Sebagai bagian dari masyarakat juga harus memiliki hak yang sama untuk memperoleh kedudukan, hak kewajiban, serta peran yang sama dalam meraih pendidikan untuk belajar, kesehatan, lapangan pekerjaan dan hak kelayakan untuk hidup. Akan tetapi pada kenyataannya saat ini masih banyak stigma negatif terkait penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas

dianggap sebagai warga masyarakat yang memiliki keterbatasan, sehingga mengakibatkan mereka tidak produktif dan tidak kreatif, karena keadaan intelektual bahkan keadaan fisik yang terganggu sehingga mereka tidak mampu mengerjakan segala pekerjaan dan tanggung jawabnya seperti yang dilakukan oleh orang-orang normal pada umumnya sehingga hak-haknya pun terabaikan. Wilayah Kabupaten Wonogiri sendiri terdiri dari 25 kecamatan, 43 kelurahan, dan 251 desa. Berikut data penyandang disabilitas di Kabupaten Wonogiri berdasarkan Kecamatan, diakses dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Wonogiri dari tahun 2017 sampai 2022.

Tabel 1. 2 Jumlah Penyandang Disabilitas di Kabupaten Wonogiri Tahun 2017, 2018, 2020, 2021 dan 2022

No.	Nama Kecamatan	2017	2018	2020	2021	2022
1	Pracimantoro	175	160	205	180	238
2	Giritontro	76	69	72	61	70
3	Giriwoyo	99	96	109	97	119
4	Batuwarno	83	74	87	88	106
5	Tirtomoyo	127	118	161	139	184
6	Nguntoronadi	63	56	71	66	89
7	Baturetno	109	106	118	107	159
8	Eromoko	117	116	131	109	159
9	Wuryantoro	86	88	97	82	121
10	Manyaran	110	109	131	109	142
11	Selogiri	102	107	108	110	169
12	Wonogiri	185	167	205	168	320
13	Ngadirojo	148	152	162	152	237
14	Sidoharjo	105	109	114	113	154

15	Jatiroto	95	93	104	105	137
16	Kismantoro	134	126	204	187	229
17	Purwantoro	123	110	134	129	195
18	Bulukerto	89	92	95	91	117
19	Slogohimo	98	97	117	117	228
20	Jatisrono	163	166	180	172	226
21	Jatipurno	56	61	62	61	89
22	Girimarto	88	73	75	68	112
23	Karangtengah	71	71	69	68	76
24	Paranggupito	104	104	108	102	110
25	Puhpelem	44	36	41	39	48
Jumlah		2.650	2.556	2.960	2.720	3.834

Sumber: DISPENDUKCAPIL Kabupaten Wonogiri

Kismantoro adalah salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Dalam data di atas yang bersumber pada Dispendukcapil menunjukkan bahwa Kecamatan Kismantoro termasuk memiliki jumlah penyandang disabilitas yang banyak, hal ini terbukti pada tahun 2017 kecamatan kismantoro menduduki urutan kelima, di tahun 2018 masih menduduki urutan kelima dan tahun 2020 mengalami lonjakan dengan menduduki urutan ketiga. Di tahun 2021 kembali mengalami lonjakan dengan menduduki urutan pertama, sedangkan di tahun 2022 menduduki urutan ke empat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Kismantoro selalu menduduki lima besar dari dua puluh lima kecamatan di Kabupaten Wonogiri.

Kecamatan Kismantoro terbagi menjadi 4 desa, termasuk Desa Pucung yang merupakan salah satu desa yang terletak di kecamatan ini. Berdasarkan penelitian

lapangan, Kepala KAUR Umum & Perencanaan menyatakan bahwa di Desa Pucung terdapat 64 warga penyandang disabilitas. Kemudian, di tahun 2018 Pemerintah Desa Pucung berinisiatif untuk mendirikan pemberdayaan bagi para penyandang disabilitas menggunakan uang dana desa. Adanya kegiatan pemberdayaan disabilitas ini sebagai bentuk keadilan hak bagi penyandang disabilitas untuk bekerja. Meskipun memiliki keterbatasan tidak selayaknya membuat para penyandang disabilitas di Desa Pucung berhenti bekerja dan berkreasi. Latar belakang adanya pemberdayaan ini dikarenakan banyaknya jumlah warga penyandang disabilitas yang ada di Desa Pucung. Sedangkan untuk tujuan adanya pemberdayaan masyarakat disabilitas ini yaitu untuk memecahkan problem ketergantungan yang dialami para penyandang disabilitas baik bergantung terhadap orang tuanya maupun bantuan dari pemerintah. Selain itu untuk meningkatkan derajat keberfungsian sosial para penyandang dalam berkehidupan masyarakat secara umum. Bentuk pemberdayaan yang dipilih oleh pemerintah Desa Pucung berupa pemberdayaan masyarakat disabilitas melalui pembuatan batik ciprat “Karya Barokah”. Alasan memilih batik ciprat dikarenakan motifnya yang unik serta proses pembuatannya pun cukup mudah dilakukan oleh penyandang disabilitas, yaitu cukup dengan teknik ciprat saja yang bersifat abstrak.

Menurut Informasi dari penelitian lapangan, perjalanan inovasi batik ciprat Karya Barokah dimulai pada bulan Agustus 2018, dengan mengadakan pelatihan batik ciprat bagi enam penyandang disabilitas yang produktif. Kemudian di tahun 2020, bertambah menjadi 23 penyandang disabilitas. Di tahun ini juga Pemerintah Desa Pucung menjadi salah satu dari 14 Desa Inklusif se-Indonesia dan diberikan

bimbingan teknis oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDDT) RI. Berdasarkan Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014 secara eksplisit berupaya merubah desa menjadi desa yang inklusif. Desa yang inklusif artinya memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh warga untuk dapat memperoleh akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa desa inklusif memiliki model pemerintahan yang mengakomodasi hak semua orang, tak terkecuali bagi penyandang disabilitas.

Penjelasan diatas dapat diketahui bahwa pemerintah desa memiliki program pemberdayaan untuk masyarakat penyandang disabilitas. Untuk mengembangkan program tersebut dapat dilakukan sebuah evaluasi program. Evaluasi program bertujuan untuk mengetahui seberapa tinggi tingkat keberhasilan dari kegiatan yang direncanakan. Seperti pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Widiyanti (2024) terkait dengan Evaluasi Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam Memberdayakan Penyandang Disabilitas Kota Pekanbaru. Penelitian tersebut menegaskan bahwa mengevaluasi program pemberdayaan untuk menilai kinerja dinas sosial. Selain itu, dapat mengetahui hambatan dari program yang dijalankan.

Pada tahun 2023, berdasarkan penelitian lapangan dengan pengelola pemberdayaan dinyatakan bahwa dari 64 penyandang disabilitas yang ada, tinggal 9 orang saja yang masih dibina dalam pemberdayaan serta masih adanya penyandang yang mengalami kendala ekonomi karena tidak mengikuti pemberdayaan. Dengan adanya permasalahan tersebut maka penelitian ini berfokus pada “Evaluasi program pada pemberdayaan masyarakat disabilitas melalui batik ciprat Karya Barokah di Kabupaten Wonogiri”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana evaluasi program pada pemberdayaan masyarakat disabilitas melalui batik ciprat Karya Barokah di Kabupaten Wonogiri?
2. Apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat dari pemberdayaan masyarakat disabilitas melalui batik ciprat Karya Barokah di Kabupaten Wonogiri?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dijelaskan sebelumnya, tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengevaluasi program pada pemberdayaan masyarakat disabilitas melalui batik ciprat Karya Barokah di Desa Pucung Kecamatan Kismantoro.
2. Untuk mengevaluasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dari pemberdayaan masyarakat disabilitas melalui batik ciprat Karya Barokah di Desa Pucung Kecamatan Kismantoro.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian merupakan sebuah kontribusi dalam bidang agar mampu memberikan pencerahan atau pengalaman bagi masyarakat tertentu. Hasil dari penelitian ini nantinya juga dapat memberikan dampak kepada pembaca terkait permasalahan dalam penelitian ini. Adapun kegunaan dalam

penelitian ini memiliki 2 kegunaan, secara praktis maupun teoritis adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan wawasan baru khususnya pada bidang Administrasi Publik mengenai evaluasi program pada pemberdayaan masyarakat disabilitas.

2. Secara praktis

- a. Bagi Universitas

Menambah literatur dan informasi sebagai bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya berkaitan dengan evaluasi program pada pemberdayaan masyarakat disabilitas di Desa Pucung Kecamatan Kismantoro.

- b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi Pemerintah Desa Pucung melalui hasil dari evaluasi program pada pemberdayaan masyarakat disabilitas melalui batik ciprat. Selain itu dapat berguna untuk instansi lainnya dalam memberikan referensi terhadap program pemberdayaan bagi kaum penyandang disabilitas.

- c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat menjadi daftar bacaan mengenai pemberdayaan masyarakat serta dapat menambah pengetahuan masyarakat untuk turut mendukung program pemerintah dalam mendirikan pemberdayaan masyarakat bagi para penyandang disabilitas.

1.5 Kajian Teori

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 1. 3 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti/Tahun/Judul	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian
Jenis Penyandang Dan Pemberdayaan			
1.	Waruwu, D., & Adhi, N. K. J. (2019). Pemberdayaan penyandang disabilitas pada objek wisata Kuta Bali.	Mengkaji tentang jenis penyandang disabilitas dan bentuk pemberdayaan penyandang disabilitas pada objek wisata Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali	Jenis penyandang disabilitas yang diberdayakan pada objek wisata Kuta yaitu tunanetra dan tunadaksa, bentuk pemberdayaan penyandang disabilitas yaitu cleaning service, tukang masak, operator CCTV, dan penjual pulsa keliling serta penyandang disabilitas masih kurang diberdayakan sehingga mereka menjadi kelompok yang terkucilkan.
2.	Purnaningrum, E., Dwiarta, I. M. B., Ariprowo, T., Waryanto, R. B. D., & Prasetyo, A. (2021). Pemberdayaan UMKM Disabilitas Trenggalek untuk Peningkatan Pendapatan Pasca Pandemi melalui Upgrading Sosial Media.	Mengkaji tentang jenis penyandang dan cara melakukan pemberdayaan UMKM Disabilitas Trenggalek untuk Peningkatan Pendapatan Pasca Pandemi melalui Upgrading Sosial Media.	Kegiatan pemberdayaan ini dengan sasaran disabilitas tuna rungu yang memiliki UMKM jenis catering. Kegiatan dilakukan dengan cara hybrid learning yakni daring dan tatap muka secara langsung dengan pendekatan berbasis penyuluhan dan praktek secara langsung.
3.	Dhairyya, A. P., & Herawati, E. (2019). Pemberdayaan Sosial dan Ekonomi pada kelompok penyandang disabilitas fisik di Kota Bandung.	Mengkaji pemberdayaan ekonomi dan sosial di Kelompok Berani Binangkit (KBB) di Kota Bandung yang mayoritas anggotanya adalah penyandang disabilitas fisik.	Pemberdayaan ekonomi di Kota Bandung belum memberikan dampak yang signifikan pada ekonomi rumah tangga para anggota. Namun, pemberdayaan sosial justru memberikan dampak yang sangat besar bagi kehidupan sosial para anggota, seperti

			bertambahnya kepercayaan diri, komunikasi yang unik antar anggota.
4.	Widiyanti, M. A. (2024). Evaluasi Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam Memberdayakan Penyandang Disabilitas Kota Pekanbaru.	Mengkaji pemberdayaan yang dilakukan dengan melakukan evaluasi untuk menilai kinerja dinas sosial.	Hasil dari penelitian ini ditentukan berdasarkan lima indikator. Pada indikator pemungkinan, penguatan, penyokong dan pemeliharaan sudah dilaksanakan dengan cukup baik oleh Dinas Sosial kota Pekanbaru. Sedangkan indikator yang kurang dalam pemberdayaan adalah perlindungan. Dari penelitian ini ditemukan juga faktor penghambat pemberdayaan penyandang disabilitas diantaranya yaitu anggaran yang terbatas, kurangnya sosialisasi, adanya penolakan dari penyandang disabilitas, serta minimnya tenaga pendamping dalam melaksanakan program.
5.	Morran, Gibbs, dan Mernin. (2017). <i>The Empowerment Model: Turning Barrier Into Possibilitie</i> .	Menganalisa hambatan berpartisipasi dan model pemberdayaan yang dilakukan untuk mengatasi hambatan penyandang disabilitas dalam baerpartisipasi dalam proses pemberdayaan	Diperlukannya model pemberdayaan dengan memberdayakan peserta, instruktur, organisasi dan masyarakat dengan cara melakukan pemrograman, pemberian dukungan, dan menyiapkan strategi pelatihan untuk mengatasi hambatan yang dirasakan peserta penyandang disabilitas.
Evaluasi Program			
6.	Ismariana, I., & Prabawati, I. (2020). Evaluasi Program Pemberian Permakanan Bagi Penyandang Disabilitas Miskin di Kelurahan Tembok Dukuh Kecamatan Bubutan Kota Surabaya.	Mendeskrripsikan evaluasi program pemberian permakanan bagi penyandang disabilitas miskin di Kelurahan Tembok Dukuh Kecamatan Bubutan Kota Surabaya.	Program pemberian permakanan bagi penyandang disabilitas miskin telah berjalan sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan tujuan. Namun masih terdapat hambatan muncul dalam pelaksanaan yaitu pencairan dana yang mundur dari tanggal semestinya, petugas kirim yang hanya satu orang menjadi tidak efisien, serta

			belum ada peraturan yang mengatur terkait detail porsi makanan.
7.	Djuanda, I. (2020). Implementasi evaluasi program pendidikan karakter model cipp (context, input, process dan output).	Mengevaluasi program keberhasilan pendidikan karakter.	Proses dan hasil Pendidikan berhasil yang mengarah pada pembentukan budi pekerti dan akhlak mulia peserta didik secara utuh, terpadu dan seimbang sesuai dengan standard kompetensi lulusan pada setiap satuan Pendidikan.
8.	Rianto, F., Nengsih, N. S., & Setyadiharja, R. (2019). Evaluasi Program Kampung Keluarga Berencana di Kota Tanjungpinang.	Mengevaluasi Program Kampung KB di Kota Tanjungpinang.	Program Kampung KB di Kota Tanjungpinang dinilai sudah berjalan dengan baik, hanya saja masih mengalami kendala terkait dukungan anggaran yang masih minim.
9.	Jumiati, I. E. (2019). Analisis Evaluasi Program Pemberdayaan Nelayan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Karangantu Kota Serang.	Mengkaji evaluasi program pemberdayaan yang selama ini telah dilakukan oleh Peran Tim Teknis dan Penyuluh Perikanan Bantu (PPB) sebagai fasilitator dan evaluator dalam evaluasi program.	Aspek analisis dan evaluasi yang dilakukan selama ini masih kurang melihat pada kondisi sosial budaya yang berlangsung di Karangantu, kemudian kebergantungan pada petunjuk teknis sangat tinggi, sehingga inisiatif-inisiatif masyarakat nelayan jarang muncul ke permukaan.
10.	Pratikto, A. G., Subowo, A., & Afrizal, T. (2022). Evaluasi Program Pengembangan Pariwisata Geopark Silokek (Studi Pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat).	Mengevaluasi dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam program pengembangan pariwisata yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sijunjung di Geopark Silokek.	Menunjukkan bahwa program pengembangan pariwisata yang dilakukan oleh DISPARPORA sudah baik tetapi evaluasi yang dilakukan oleh evaluasi program, evaluasi kesulitan atau hambatan program pelaksanaan, dan evaluasi dampak program yang ditemukan masih belum baik dan tidak ada target. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi program pengembangan wisata di Geopark Silokek, faktor pendorongnya adalah sumber daya alam Kabupaten

			Sijunjung yang melimpah, dukungan dari pemerintah dan kerjasama dari DISPARPORA dengan pemangku kepentingan. Faktor penghambat seperti masyarakat disana adalah masyarakat agraris yang pola pikirnya harus diubah menjadi pariwisata, tanah disana adalah tanah ulayat masyarakat sehingga membuatnya sulit untuk mengizinkan pembangunan daerah. Selain itu, ada masalah dengan penganggaran, akses sarana dan prasarana serta belum memiliki target pasar yang jelas.
11.	Sugianti, E. (2020). Evaluasi Program Perbaikan Gizi Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dalam Pos Gizi di Kabupaten Bojonegoro. <i>CAKRAWALA</i> , 14(2), 113-128.	Mengevaluasi program pos gizi dari segi input, proses, dan output.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari aspek input, kualitas SDM masih kurang, pengorganisasian, petunjuk pelaksanaan, sarana prasarana sudah cukup, pendanaan dan kontribusi bahan makanan belum memadai. Dari aspek proses, pelatihan, penyelidikan positive deviance, dan kunjungan ke rumah masih belum dilakukan. Dari aspek output, perilaku kesehatan pengasuh sudah baik, namun perubahan berat badan dan status gizi balita masih belum baik. Perlunya kehadiran pengasuh, kontribusi bahan makanan, dan penerapan perilaku kesehatan guna meningkatkan keberhasilan program pos gizi.
12.	Laiya, I. (2021). Evaluasi Program Pembelajaran Online Mata Pelajaran Matematika Madrasah Ibtidaiyah.	Mengevaluasi program dari permasalahan pembelajaran online mata pelajaran Matematika, keunggulan dan kelemahan program	Berdasarkan hasil penelitian, proses pembelajaran online untuk mata pelajaran Matematika pada siswa kelas VI Madrasah Ibtidaiyah Ziyadatun Nikmah hanya menggunakan aplikasi whatsapp saja. Proses pembelajaran menjadi tidak efektif karena siswa lebih

		pembelajaran online, serta pengaruhnya terhadap pengalaman belajar siswa	bergantung pada jawaban yang tersedia di internet. Siswa juga mengalami penurunan dalam hal kualitas pengetahuannya. Meskipun di sisi lain pembelajaran online bisa berlangsung dimana saja dan kapan saja, namun, proses pembelajaran online ini sangat berpengaruh pada pengalaman belajar siswa.
13.	Sukmana, D. (2022). Evaluasi Program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat.	Mengevaluasi program sejauh mana Implementasi Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat (ASPD) dan dampaknya terhadap pemenuhan kebutuhan dasar.	Pada Implementasinya, program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat dapat dikatakan kurang memenuhi kebutuhan dasar masyarakat karena jumlah dana yang diberikan kurang mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari bagi penerima manfaat. Namun, mengingat bahwa penerima manfaat program ini telah memberikan perubahan lebih baik daripada tidak sama sekali, yang ditandai dengan keterpenuhan kebutuhan makanan, penambahan gizi, dan peningkatan kesehatan.
14.	Eryanto, H., Swaramarinda, D. R., & Nurmalasari, D. (2019). <i>Effectiveness of entrepreneurship practice program: using CIPP program evaluation.</i>	Mengevaluasi program praktik kewirausahaan dan mengetahui sejauh mana keberhasilan program tersebut serta menganalisis tanggapan dan masukan serta kendala dalam implementasi kebijakan terkait penyelenggaraan program praktik kewirausahaan di SMK di Jawa Barat.	Implementasi produk Program ini mampu mengembangkan kompetensi dan prestasi akademik mahasiswa. Hal ini dibuktikan dengan rata-rata prestasi belajar siswa kelas XII jurusan komputer dan jaringan di SMK Negeri 7 Semarang termasuk dalam kategori baik.

Berdasarkan penelitian terdahulu, peneliti menyimpulkan bahwa yang dibahas pada penelitian ini yaitu tentang strategi dan program dalam melakukan pemberdayaan masyarakat disabilitas, untuk mengetahui potensi dan kendala dalam pengembangan pemberdayaan tersebut. Berdasarkan penelitian terdahulu setiap penelitian tentunya memiliki fokus, lokus dan pemilihan model teori masing-masing pada penelitiannya. Oleh karena itu diperlukan sebuah ide atau gagasan yang akan membuat penelitian berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya. Sedangkan penelitian ini akan membahas tentang studi evaluasi program pada pemberdayaan masyarakat disabilitas melalui batik ciprat di Desa Pucung Kecamatan Kismantoro yang akan menjadi bahan pertimbangan oleh para stakeholder untuk menentukan program selanjutnya dalam pengembangan pemberdayaan masyarakat.

1.5.2 Administrasi Publik

Menurut Nicholas Henry (dalam Mulyadi, 2016;34), Administrasi publik merupakan suatu kombinasi yang kompleks antar teori dan praktik dengan tujuan mempromosikan pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah, dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial. Administrasi publik juga berusaha untuk melembagakan praktik-praktik manajemen agar sesuai dengan nilai efektifitas dan efisiensi. Kemudian Herbert A. Simon 1993 (dalam Pasolong, 2007: 2) mengemukakan bahwa administrasi yaitu kegiatan kelompok kerjasama agar terwujud tujuan kolektif. Kegiatan tersebut adalah pekerjaan yang terencana dan terstruktur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih atau sekelompok orang yang

bekerjasama untuk mewujudkan tujuan yang telah ditentukan atas dasar efektif, efisien dan rasional.

Adapun Chandler & Plano (dalam Pasolong, 2014:7) menjelaskan bahwa administrasi publik adalah langkah memberdayakan sumber daya manusia secara koordinatif dan terorganisir untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan melakukan pengelolaan terhadap suatu keputusan dalam kebijakan publik.

Berdasarkan uraian dari para ahli, maka dari penelitian dapat disimpulkan bahwa administrasi publik ialah ilmu yang memahami hubungan pemerintah dengan publik yang bertujuan meningkatkan responsibilitas kebijakan serta melembagakan praktik manajerial sehingga kegiatan-kegiatan dapat berjalan secara efektif, rasional dan efisien. Selain itu, dalam administrasi publik terdapat memberdayakan manusia secara koordinatif dan terorganisir dalam melakukan pengelolaan terhadap keputusan kebijakan publik. Di dalam administrasi publik juga terdapat ilmu manajemen dan organisasi guna mencapai tujuan yang diinginkan oleh lembaga dan atau pemerintahan.

1.5.3 Paradigma Administrasi Publik

Paradigma merupakan sekumpulan teori yang memiliki cara pandang yang sama. Menurut Henry (Ikeanyibe et al., 2017: 3) terdapat enam paradigma dalam administrasi publik, yaitu:

1. Paradigma 1 - Dikotomi Politik dan Administrasi (1900-1926)

Paradigma 1 atau paradigma dikotomi politik dan administrasi yang dibawa oleh Frank J. Goodnow dan Leonard D. White menekankan lokus daripada fokusnya. Lokus dari paradigma ini adalah *government*

bureaucracy. Dalam buku tersebut menyatakan bahwa terdapat dua perbedaan fungsi pemerintah yaitu fungsi politik dan fungsi administrasi. Dalam fungsi politik yaitu suatu tindakan yang dilakukan pemerintah melalui kebijakan yang dimiliki negara. Sedangkan dalam fungsi administrasi, yaitu mencangkup pada peran eksekutif dalam menjalankan kebijakan. Telihat terdapat pemisahan kekuasaan dengan ditandai perbedaan fungsi kewenangan tersebut.

2. Paradigma 2 - Prinsip-prinsip Administrasi (1927-1937)

Paradigma 2 atau paradigma prinsip-prinsip administrasi dibawa oleh Willoughby Gullick dan Urwick. Pada paradigma ini fokusnya lebih ditekankan daripada lokusnya. Hal ini karena pada paradigma ini menganggap bahwa lokus dapat dilakukan dimanapun termasuk di sektor pemerintahan.

3. Paradigma 3 - Administrasi Publik sebagai Ilmu Politik (1950-1970)

Dikenal dengan paradigma administrasi publik sebagai ilmu politik, dimana administrasi publik mengalami krisis identitas dan ilmu politik sangat dominan dalam dunia administrasi publik (Keban, 2014: 33). Lokus dalam paradigma ini lebih diutamakan daripada fokus. Lokus dari paradigma ini adalah birokrasi pemerintahan.

4. Paradigma 4 – Administrasi Publik sebagai Manajemen (1956-1970)

Paradigma ini dikenal dengan paradigma administrasi publik sebagai manajemen. Pada paradigma ini lokus menjadi tidak jelas dan lebih

mementingkan fokus. Fokus lebih diperhatikan disini karena manajemen dapat diterapkan di dunia administrasi publik tidak hanya di dunia bisnis.

5. Paradigma 5 – Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik (1970-Sekarang)

Paradigma 5 yaitu paradigma administrasi publik sebagai administrasi publik. Paradigma ini telah memiliki fokus dan lokus yang jelas. Fokus administrasi publik dalam paradigma ini adalah teori organisasi, teori manajemen, dan kebijakan publik; sedangkan lokusnya adalah masalah-masalah dan kepentingan-kepentingan publik (Keban, 2014: 33).

6. Paradigma Governance (1990-Sekarang)

Paradigma governance merupakan suatu bentuk reformasi mengubah orientasi yang dilakukan sebelumnya yaitu menekankan arti penting kesetaraan antara institusi negara, swasta dan masyarakat dengan mendasarkan diri pada prinsip-prinsip *good governance*. Paradigma ini mengutamakan mekanisme dan proses dimana warga negara dapat mengartikulasikan kepentingannya, pemerintah diharapkan dapat memainkan perannya dalam menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, sedangkan sektor swasta memainkan perannya menciptakan lapangan pekerjaan dan pendapatan (Ikeanyibe et al., 2017: 11). Pada paradigma ini terdapat tiga isu penting yaitu *partnership*, *networking*, dan *collaboration*. Orientasi administrasi publik yang semua adalah kekuasaan kini menjadi pelayan negara.

Dalam penelitian ini menggunakan paradigma administrasi publik ke enam yaitu governance. Hal ini karena dalam manajemen publik membutuhkan peran pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) sebagai suatu acuan yang harus dibangun oleh birokrasi suatu lembaga atau institusi agar dapat menjalankan fungsi-fungsi manajemen publik dengan semestinya. Pada dasarnya fokus manajemen publik salah satunya adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat. Dalam pelaksanaan pemberdayaan juga melibatkan peran pemerintah, pihak swasta serta partisipasi masyarakat dalam memberikan tanggung jawab sosialnya untuk dapat mengelola pemberdayaan masyarakat sehingga dapat berkelanjutan dan mencapai tujuan yang telah ditentukan.

1.5.4 Manajemen Publik

Menurut Shafritz dan Russel (dalam Keabab, 2008:93), Manajemen Publik diartikan sebagai upaya seseorang untuk bertanggungjawab dalam menjalankan suatu organisasi, dan pemanfaatan sumber daya (orang dan mesin) guna mencapai tujuan organisasi.

Menurut Perry dan Kracmer dalam Keabab (2008 :100), terdapat empat prinsip dasar bagi administrasi publik yang meliputi bidang manajemen publik, yaitu:

- 1) Pemerintah sebagai setting utama organisasi.
- 2) Fungsi eksekutif sebagai fokus yang utama.
- 3) Pencarian prinsip-prinsip dan teknik manajemen yang lebih efektif sebagai kunci pengembangan kompetensi administrasi.
- 4) Metode perbandingan sebagai metode studi dan pengembangan bidang administrasi publik.

Peran manajemen publik dalam penelitian ini berupa bentuk dukungan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pemerintah dalam upaya memberikan daya atau penguatan kepada masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat. Pada dasarnya fokus manajemen publik salah satunya adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat.

1.5.5 Evaluasi Program

Menurut Suharsimi Arikunto (1993:297), melakukan evaluasi program adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk mengetahui seberapa tinggi tingkat keberhasilan dari kegiatan yang direncanakan. Dengan kata lain, evaluasi program dimaksudkan untuk melihat pencapaian target program dan menentukan seberapa jauh target program sudah tercapai, yang nantinya akan dijadikan tolak ukur dari tujuan yang sudah dirumuskan dalam tahap perencanaan kegiatan.

Menurut Endang Mulyatiningsih (2011: 114-115), evaluasi program dilaksanakan dengan tujuan:

- a. Sebagai sumbangan program terhadap pencapaian tujuan organisasi. Hasil evaluasi ini penting untuk mengembangkan program yang sama ditempat lain.
- b. Sebagai pengambilan keputusan keberlanjutan dalam sebuah program, apakah program perlu diteruskan, diperbaiki atau dihentikan.

Dilihat dari tujuannya, yaitu ingin mengetahui kondisi sesuatu, maka evaluasi program dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk penelitian evaluatif. Dalam melakukan evaluasi program terdapat beberapa model menurut Zainal Arifin (2010:10) yang dapat digunakan untuk melihat efektifitas sebuah program, yaitu:

- 1) Model Evaluasi Alkin

Evaluasi model UCLA hampir sama dengan model CIPP, model evaluasi ini dikembangkan oleh Alkin yang mendefinisikan evaluasi sebagai suatu proses meyakinkan keputusan, memilih informasi yang tepat, mengumpulkan dan menganalisis informasi sehingga dapat melaporkan ringkasan data yang berguna bagi pembuat keputusan dalam memilih beberapa alternative. Marvin Alkin (1969) mengemukakan terdapat lima macam evaluasi yakni sebagai berikut:

- a. *System assesment*, yaitu memberikan informasi tentang keadaan atau posisi sistem.
- b. *Program planning*, membantu pemilihan program tertentu yang mungkin akan berhasil memenuhi kebutuhan program.
- c. *Program implementation*, yang menyiapkan informasi apakah program sudah diperkenalkan kepada kelompok tertentu yang tepat seperti yang direncanakan.
- d. *Program improvment*, yaitu program yang memberikan informasi tentang bagaimana program berfungsi, bagaimana program bekerja, apakah dalam menuju pencapaian tujuan ada hal-hal atau masalah-masalah baru yang muncul.
- e. *Program certification*, yang memberikan informasi tentang nilai atau guna program.

2) Illuminative Model

Model illuminative ini lebih menekankan pada penilaian kualitatif. Model ini pada awalnya diperkenalkan oleh Hanley pada 1969. Model evaluasi illuminatif memiliki 3 tahapan fase yaitu;

- a. *Observasi*, langkah yang mempunyai peran penting karena evaluator yang akan menggunakan model illuminatif ini harus melakukan pengamatan terhadap program yang dilakukan.
- b. Tahap *inkuiri* dimana evaluator pada tahap ini akan memisahkan data penting dan yang tidak penting untuk dianalisa. Pada tahap ini pula evaluator tidak hanya “mengetahui” program itu berjalan tetapi mengapa program itu dapat berjalan.
- c. Tahap *explanasi* dimana pada tahap ini evaluator tidak saja memberikan pertimbangan dan keputusan pada hasil penelitiannya, tetapi memperkaya data tersebut dengan cara menjelaskan apa yang terjadi dan mengapa itu bisa terjadi.

Dalam penelitian ini menggunakan teori evaluasi program illuminatif model, berdasarkan penelitian sebelumnya, Praktiko, G., Subowo, A., & Afrizal, T. (2022). Evaluasi Program Pengembangan Pariwisata Geopark Silokek (Studi Pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat), hasil evaluasi dari model illuminatif ini tidak berupa pengukuran dan prediksi akan tetapi lebih bersifat deskriptif dan interpretasi. Selain itu tahapan yang ada pada teori ini sesuai dengan objek yang diteliti, yaitu pelaksanaan program, permasalahan dari pelaksanaan program dan pengaruh dari pelaksanaan program tersebut.

1.5.6 Pemberdayaan Masyarakat

Maryani (2019) mengemukakan bahwa pemberdayaan masyarakat ialah proses pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat dan masyarakat berinisiatif untuk memperbaiki situasi kondisi diri sendiri. Kemudian Mardikanto dan Soebianto (2019: 100) menyebutkan pemberdayaan masyarakat adalah proses perubahan sosial, ekonomi, dan politik untuk memberdayakan dan memperkuat kemampuan masyarakat melalui proses belajar bersama yang partisipatif, agar terjadi perubahan perilaku pada semua stakeholder (individu, kelompok, kelembagaan) yang terlibat dalam proses pembangunan sehingga terwujudnya kehidupan yang semakin berdaya, mandiri, partisipatif yang semakin sejahtera secara berkelanjutan. Pemberdayaan berarti mendayagunakan masyarakat yang sebelumnya *powerless* menjadi *powerful*. Mardikanto (dalam Maryani, 2019: 8) menyebutkan enam tujuan pemberdayaan masyarakat:

1. Perbaiki Kelembagaan

Perbaiki kelembagaan meliputi perbaikan jejaring kemitraan usaha. Kelembagaan yang baik akan mendorong partisipasi dari masyarakat dan berdampak pada fungsi dari kelembagaan tersebut. Lembaga yang baik memiliki visi, misi, tujuan yang jelas, sasaran yang dapat diukur, dan program kerja terarah. Anggota dari kelembagaan juga harus mengambil peran, saling memotivasi dan membagikan kapasitas dan kemampuannya (waktu, pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan).

2. Perbaikan Usaha

Perbaikan usaha yaitu mampu memberikan manfaat luas kepada masyarakat dengan memenuhi semua kebutuhan seluruh anggota yang bersangkutan. Perbaikan usaha ini merupakan kelanjutan dari perbaikan kelembagaan.

3. Perbaikan Pendapatan

Perbaikan bisnis akan berdampak pada peningkatan pendapatan anggota lembaga tersebut. Peningkatan pendapatan merupakan perbaikan pendapatan.

4. Perbaikan Lingkungan

Perbaikan lingkungan meliputi peningkatan kualitas lingkungan seperti penataan lingkungan kumuh, peningkatan penghijauan di lingkungan sekitar, dan memunculkan karakteristik kekhasan wilayah sebagai suatu potensi yang dapat dioptimalkan dan dimaksimalkan. Perbaikan lingkungan juga berimplikasi dari perbaikan pendapatan. Perbaikan pendapatan turut serta dalam hal memperbaiki lingkungan baik fisik maupun sosial karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh pendapatan yang terbatas atau kemiskinan.

5. Perbaikan Kehidupan

Perbaikan kehidupan dapat dilihat melalui berbagai indikator seperti tingkat kesehatan, tingkat pendidikan, dan tingkat pendapatan masing-masing keluarga. Perbaikan kehidupan juga berimplikasi dari perbaikan pendapatan. Pendapatan yang membaik dapat memperbaiki keadaan keluarga atau masyarakat.

6. Perbaikan Masyarakat

Perbaikan masyarakat adalah kehidupan yang lebih baik didukung oleh lingkungan “fisik dan sosial” sehingga terwujud kehidupan kelompok masyarakat yang lebih baik.

1.5.7 Faktor Pendukung dan Penghambat

Faktor yang mempengaruhi proses inovasi pada sebuah organisasi terbagi menjadi dua macam yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Untuk faktor pendukung menurut KBBI ialah suatu hal atau kondisi yang dapat mendukung atau menumbuhkan suatu kegiatan. Sedangkan faktor penghambat adalah suatu hal atau peristiwa yang ikut menyebabkan suatu keadaan yang menghambat dalam mengaplikasikannya pada saat proses berlangsung.

Teori Jim Ife dalam buku "Community Development: Creating Community Alternatives-vision, analysis and practice" terdapat beberapa faktor yang mendukung serta menghambat terjadinya pemberdayaan yaitu sebagai berikut:

- a. Partisipasi Aktif merupakan bentuk keterlibatan aktif dan partisipasi komunitas dalam proses pengambilan Keputusan dan pelaksanaan program pemberdayaan.
- b. Pendidikan dan Keterampilan merupakan pemberian pembelajaran atau bekal ilmu kepada remaja atau kelompok masyarakat agar mampu mengelola sumberdaya dan mencapai tujuan masyarakat.
- c. Kurangnya Dukungan Pemerintah merupakan ketidakberlanjutan dukungan dari pemerintah sehingga dapat menghambat kesinambungan program

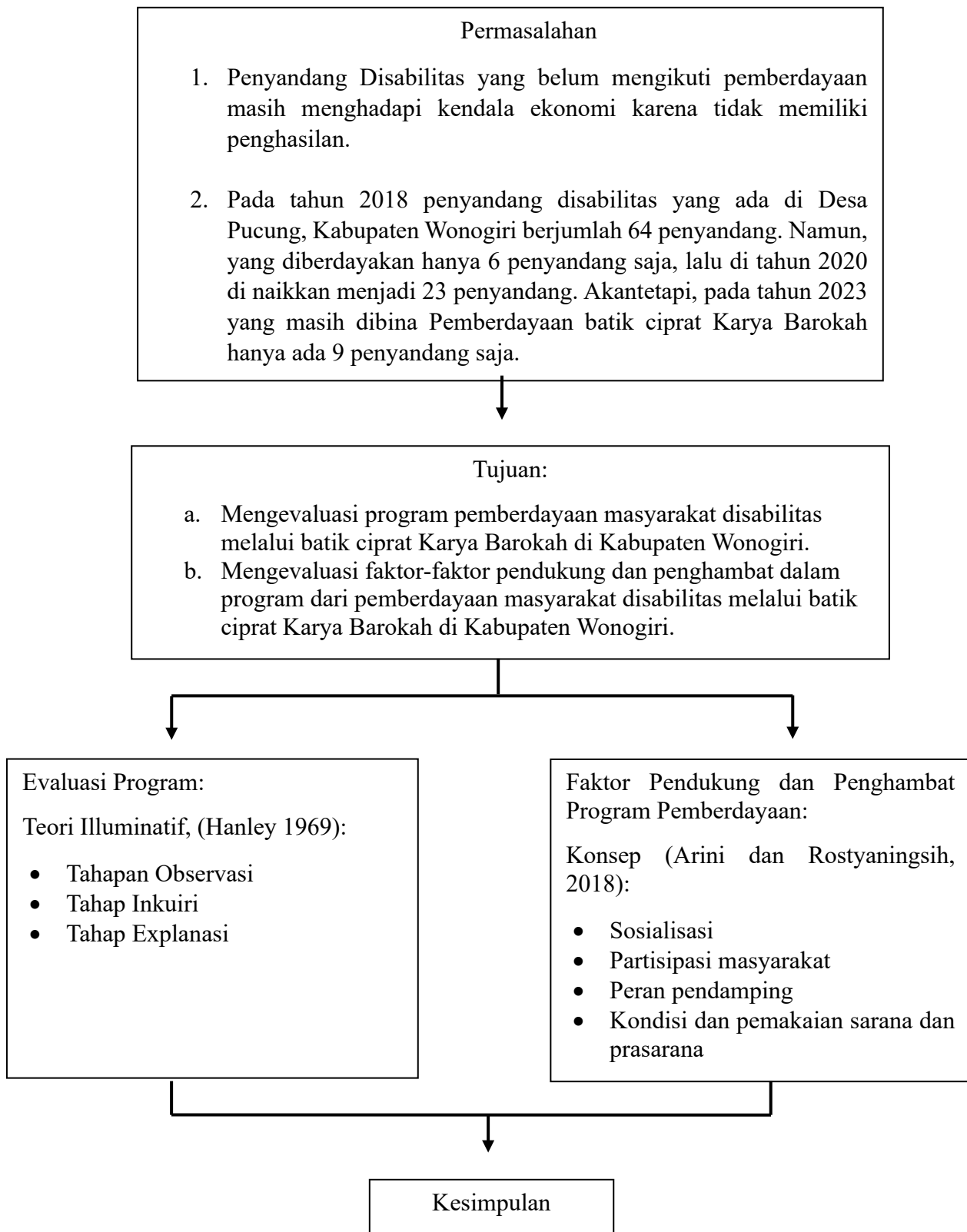
pemberdayaan dalam masyarakat, sedangkan tugas utama pemerintah yaitu mengarahkan masyarakat pada kemandirian dan Pembangunan demi terciptanya kemakmuran dalam kehidupan masyarakat.

Sedangkan, Menurut Arini dan Rostyaningsih (2018) pada penelitiannya menyebutkan faktor pendorong dan penghambat program pemberdayaan masyarakat sebagai berikut:

- a. Sosialisasi merupakan suatu bentuk upaya mengenalkan atau mempromosikan sesuatu hingga dikenal, dipahami oleh kalangan tertentu.
- b. Partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan Masyarakat untuk turut berkontribusi dalam kegiatan tertentu.
- c. Peran pendamping merupakan pihak yang dianggap kompeten atau fasilitator untuk memberikan arahan dan dorongan.
- d. Kondisi dan pemakaian sarana dan prasarana merupakan keadaan peralatan dan perlengkapan yang digunakan sebagai penunjang program.

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan sebelumnya diketahui bahwa tahapan faktor pendukung dan penghambat sangat beragam. Dalam penelitian ini menggunakan teori menurut Arini dan Rostyaningsih (2018), terlihat indikator-indikator yang menjadi alat uji analisis terhadap faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan evaluasi program pada pemberdayaan, yang terdapat dalam penelitian ini. Sesuai dengan pengukuran model Arini dan Rostyaningsih, maka berikut akan dilakukan analisis pada empat indikator tersebut.

1.6 Kerangka Pemikiran Teoritis



1.7 Operasionalisasi Konsep

Penelitian ini dilatar belakangi oleh penyandang disabilitas yang masih mengalami kendala ekonomi karena tidak memiliki penghasilan dan dari 60 penyandang disabilitas yang dibina dalam pemberdayaan masyarakat disabilitas melalui batik ciprat Karya Barokah hanya 9 penyandang saja. Sedangkan untuk mengevaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat Disabilitas menggunakan Teori model illuminatif serta Faktor Pendukung dan Penghambat konsep dari Arini dan Rostyaningsih.

a. Evaluasi Program

Evaluasi Program merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat disabilitas untuk menilai apakah program pemberdayaan masyarakat disabilitas yang dilakukan telah mengenai tingkat keberhasilan atau tingkat kegagalan. Dalam penelitian ini menggunakan teori model illuminatif yang terdiri dari:

- Observasi, merupakan langkah yang mempunyai peran penting karena harus dilakukan pengamatan terhadap program pemberdayaan masyarakat disabilitas.
- Tahap inkuiri, dimana ditetapkan isu dan persoalan yang ada di dalam program pemberdayaan masyarakat disabilitas, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat atau tidak terdapat lagi persoalan baru lainnya.
- Tahap eksplanasi, dijelaskan sebab akibat dari persoalan yang ada dalam program pemberdayaan masyarakat disabilitas.

b. Faktor Pendukung dan Penghambat

Faktor pendukung dan penghambat adalah semua faktor-faktor yang mempengaruhi berjalannya Program Pemberdayaan Masyarakat Disabilitas di Desa Pucung, Kecamatan Kismantoro, Kabupaten Wonogiri. Dalam penelitian ini menggunakan konsep Arini dan Rostyaningsih (2018), yang memuat empat faktor yang mempengaruhi evaluasi program yaitu:

- Sosialisasi yang dilakukan dapat berupa upaya mengenalkan atau mempromosikan program pemberdayaan masyarakat disabilitas, sehingga dapat dikenal, dipahami oleh kalangan tertentu.
- Partisipasi masyarakat dapat berupa keikutsertaan masyarakat untuk turut berkontribusi dalam berjalannya program pemberdayaan masyarakat disabilitas.
- Peran pendamping merupakan pihak yang kompeten atau fasilitator untuk memberikan arahan dan dorongan dalam berjalannya program pemberdayaan masyarakat disabilitas.
- Kondisi dan pemakaian sarana dan prasarana merupakan keadaan peralatan dan perlengkapan yang digunakan sebagai penunjang program pemberdayaan masyarakat disabilitas dalam pembuatan batik ciprat.

1.8 Argumen Penelitian

Alasan adanya penelitian Evaluasi Program pemberdayaan Masyarakat disabilitas melalui batik ciprat karya barokah di Desa Pucung ini didasari oleh melihat adanya permasalahan penyandang disabilitas masih menghadapi kendala ekonomi karena tidak berpenghasilan dan dari program pemberdayaan masyarakat disabilitas ini berupa penyandang yang dibina hanya terdapat 9 penyandang saja

sedangkan jumlah penyandang disabilitas di Desa Pucung terdapat 60 orang. Dalam permasalahan tersebut pemberdayaan masyarakat disabilitas yang dilakukan dapat dikatakan masih belum maksimal. Oleh karena itu, penelitian ini akan berfokus pada mengembangkan program yang sudah ada dan membantu untuk melakukan evaluasi program pemberdayaan disabilitas ini. Sedangkan untuk alasan memilih situs penelitian ini dikarenakan Desa Pucung menjadi salah satu dari 14 Desa Inklusif se-Indonesia dan satu-satunya pemberdayaan disabilitas pembuatan batik ciprat yang ada di Kabupaten Wonogiri.

Dalam melakukan penelitian ini akan menggunakan Teori Evaluasi Program Model Illuminatif, yang memiliki 3 tahapan yaitu: Observasi, Inkuiri dan Explanation. Serta teori faktor pendukung dan pengahambat menurut Arini dan Rostyaningsih, yang terdiri dari 4 konsep yaitu: Sosialisasi, Partisipasi Masyarakat, Peran pendamping, Kondisi dan pemakaian sarana dan prasarana. Alasan peneliti memilih teori-teori tersebut karena sesuai dengan objek yang peneliti teliti, yaitu seperti pelaksanaan program, kekurangan dan kelebihan dari pelaksanaan program dan pengaruh dari pelaksanaan program tersebut.

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2008 : 15) penelitian kualitatif deskriptif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objektif yang alamiah dengan peneliti sebagai instrument kunci. Selain itu Nawawi dan Martini (1994 : 73) mengemukakan bahwa metode deskriptif dalam penelitian kualitatif sebagai

metode yang menggambarkan situasi objektif atau kejadian khusus berlandaskan kenyataan yang ada yang kemudian diiringi dengan upaya pengambilan kesimpulan umum berdasarkan kenyataan tersebut.

Berdasarkan pendapat diatas, pada dasarnya dalam penelitian ini termasuk penelitian kualitatif deskriptif yang bermaksud untuk mendeskripsikan secara objektif dan lebih mendalam dalam mengolah data-data yang didapatkan di lapangan.

1.9.2 Situs Penelitian

Lokasi atau tempat penelitian ini berada di Desa Pucung, Kecamatan Kismantoro, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Yang dimaksud dengan situs penelitian disini adalah suatu tempat dimana peneliti menangkap keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti untuk memperoleh data atau informasi yang diperlukan. Pemilihan situs penelitian ini dikarenakan Desa Pucung memiliki penyandang disabilitas yang cukup banyak, merupakan satu-satunya Desa yang mendirikan pemberdayaan Masyarakat disabilitas, Desa Pucung menjadi salah satu dari 14 Desa Inklusif se-Indonesia.

1.9.3 Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini dapat disebut sebagai informan. Informan ialah narasumber yang menunjang penelitian kualitatif dengan memaparkan informasi kondisi latar penelitian (Moleong, 1999 : 90). Subjek dalam penelitian ini adalah para informan yang tahu dan terlibat dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Disabilitas ini dan berkompeten sehingga dapat memberikan data yang

diperlukan bagi penelitian. Berdasarkan hal tersebut teknik yang digunakan untuk menentukan informan yaitu purposive sampling. Menurut (Sugiyono, 2016:85) purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel berupa sumber data dengan pertimbangan tertentu. Oleh karena itu, yang menjadi Subjek penelitian terdiri dari instansi pemerintah yaitu Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri, Pemerintah Desa Pucung serta pengelola pemberdayaan.

Tabel 1. 4 Data Informan

Instansi	Narasumber
Dinas Sosial	a. Kepala / Sekretariat Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri b. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial
Pemerintah Desa	c. Kepala Desa Pucung d. KAUR Desa sebagai pengelola pemberdayaan
Masyarakat	e. Keluarga Penyandang Disabilitas

Pemilihan narasumber dari instansi Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri terdapat dua orang yaitu Kepala Dinas sosial dan Kepala Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial. Narasumber pertama Kepala Dinas Sosial (atau Sekretariat Dinas Sosial) karena selaku instansi pemerintah yang menangani masalah pemberdayaan masyarakat dan disabilitas untuk memberikan pemberdayaan terhadap penyandang disabilitas. Narasumber kedua yaitu Kepala Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitas

Sosial berperan untuk merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas.

Narasumber selanjutnya dari Pemerintah Desa Pucung sendiri, yang terdiri dari Kepala Desa dari Desa Pucung. Yang menjadi narasumber ketiga KAUR Desa karena beliau sebagai pengelola pemberdayaan masyarakat disabilitas ini sehingga beliau memiliki peran memimpin tim dalam pengembangan dan keberjalanan pemberdayaan masyarakat disabilitas. Narasumber terakhir yaitu keluarga penyandang disabilitas sebagai informan yang menjadi sasaran utama dari program pemberdayaan disabilitas.

1.9.4 Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini, antara lain:

1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah perolehan data secara langsung dari sumber data yang diperlukan (Sugiyono, 2009: 225). Data primer didapatkan peneliti dengan cara diperoleh langsung dari subjek penelitian. Sumber data primer yang diambil dalam penelitian adalah data yang diperoleh dari wawancara dengan orang yang penulis pilih karena mengetahui atau terlibat secara langsung dengan permasalahan dan observasi. Jenis data yang ingin penulis dapatkan adalah evaluasi program pemberdayaan Masyarakat disabilitas melalui batik ciprat karya barokah di Desa Pucung, Kecamatan Kismantoro serta pendukung dan penghambatnya.

2. Sumber data sekunder

Data sekunder menurut sugiyono (2018) merupakan data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung, maksud dari data secara tidak langsung yaitu dari objek penelitian yang berupa dari dokumen, kebijakan atau peraturan, buku, jurnal, dan lain-lain yang berhubungan langsung dengan penelitian ini.

1.9.5 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data, antara lain dengan:

1) Wawancara

Menurut Moleong dan Gorden, wawancara merupakan metode penggalan informasi dengan melakukan percakapan antara kedua belak pihak. Sehingga dengan dilakukannya wawancara peneliti akan mengetahui informasi lebih dalam yang mungkin belum ada disumber-sumber.

Dalam hal ini peneliti akan menggunakan bentuk wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang akan dilakukan dengan berdasarkan pada pedoman wawancara dengan tujuan mendapat jawaban secara luas dan mendalam sesuai topik masalah yang dirumuskan dan untuk mempersingkat waktu penelitian.

2) Observasi

Observasi yaitu aktivitas atau penelitian yang dilaksanakan secara langsung ke lokasi yang diteliti dalam rangka mengetahui fenomena dan suatu yang terjadi di lokasi penelitian. Metode observasi dapat dimaksudkan suatu cara pengambilan data melalui pengamatan langsung terhadap situasi atau peristiwa yang ada dilapangan. Dalam melakukan Observasi penulis memilih secara terstruktur, yang

artinya dalam melakukan observasi penulis mengacu pada pedoman yang telah disiapkan terlebih dahulu oleh penulis.

3) Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan pengambilan gambar, merekam data yang diberikan oleh para informan dalam bentuk tulisan atau arsip-arsip yang berkaitan dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat disabilitas di Kecamatan Kismantoro serta mencatat setiap detail informasi yang diberikan oleh informan.

1.9.6 Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data merupakan kegiatan dimana mencari dan menyusun data yang diperoleh, yang kemudian dikelompokkan berdasarkan data yang penting untuk dijadikan sebagai fokus, kemudian ditarik kesimpulan dari data-data yang diperoleh sehingga dapat dipahami oleh diri sendiri dan pembaca (Satori & Komariah, 2014: 201).

Dalam penelitian ini, model analisis dan interpretasi data yang digunakan yaitu metode analisis kualitatif dari Miles dan Huberman, yang terdiri dari mereduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. (Satori & Komariah, 2014:218-220).

- a. Tahap reduksi data, berarti tahap dimana peneliti melakukan penulisan kembali dari hasil data yang diperoleh ke dalam bentuk teks kemudian memilih hal penting yang terjadi, lalu mengelompokkan berdasarkan tema dan

kategori tertentu supaya mempermudah peneliti untuk mencari tambahan data jika masih diperlukan.

- b. Tahap penyajian data, tahap menyajikan data dalam bentuk uraian singkat, bagan maupun tabel dengan tujuan memudahkan peneliti untuk memahami peristiwa yang terjadi dan kemudian membuat rencana selanjutnya.
- c. Tahap penarikan kesimpulan, adalah tahap membuat jawaban sementara atas rumusan masalah sehingga dapat menghasilkan temuan baru yang belum jelas sebelumnya.

1.9.7 Kualitas Data

Dalam melakukan suatu penelitian harus membuktikan bahwa data informasi yang dipakai benar-benar tepat dan konsisten. Maka dari itu diperlukannya uji kredibilitas data untuk memeriksa kualitas data yang diperoleh. Pada penelitian ini menggunakan cara Triangulasi untuk memperoleh kredibilitas. Triangulasi adalah pengecekan data yang diperoleh melalui berbagai sumber, cara dan waktu agar mendapatkan data yang sesuai dengan kenyataan sesungguhnya (Satori & Komariah, 2014:170).

Penelitian menggunakan model ini karena dalam mendapatkan data dengan mengecek dari berbagai sumber yang kemudian dideskripsikan, dikategorisasikan pandangan mana yang sama, yang berbeda, dan mana yang spesifik dari tiga sumber data tersebut. Dimana data yang telah di analisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan yang akurat dan tepat.

